BPPM MAHKAMAH FAKULTAS HUKUM UGM

mahkamah

Edisi ke 25/XXVII/VI/2013

MASIH PANCASILA?

Dari Redaksi

Salam Persma!

Bulan Juni 1945, kala waktu dipenuhi dengan perdebatan para tokoh bangsa, lahirlah sebuah pemikiran tentang konsepsi kenegaraan yang dinamai Pancasila. Dalam kurun waktu yang panjang, Pancasila telah menjadi dasar dan pondasi bangsa Indonesia untuk berdiri sebagai sebuah negara yang berdaulat.

Sejarah telah mencatat, bagaiamana Pancasila terus bertahan sebagai pondasi yang kokoh untuk menjadi dasar dalam segala tindakan negara. Berbagai peristiwa telah menjadi saksi penobatan Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa yang tak terbantahkan keberadaannya.

Dalam perkembangannya, pasca peristiwa Reformasi 1998, keadaan bangsa yang tidak kondusif mulai mempertanyakan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara. Maraknya berbagai tindakan yang menciderai nilai-nilai Pancasila menjadi salah satu poin penting dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut. Belum lagi pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila yang kian memudar dari kehidupan masyarakat dewasa ini.

Berbagai permasalahan yang menyangkut tentang Pancasila menjadi pemantik daya tarik tersendiri bagi para awak Mahkamah untuk menerbitkan buletin edisi Pancasila ini. Buletin ini mengupas tentang eksistensi Pancasila sebagai sebuah dasar negara dari berbagai sudut pandang.

Pepatah telah mengatakan bahwa tiada gading yang tak retak. Kami pun menyadari dalam penulisan buletin ini masih banyaknya kekurangan dari berbagai segi. Segala bentuk kritik dan saran akan menjadi koreksi bagi kami untuk terus berkarya.

Akhir kata, selamat membaca dan berimajinasi, kemudian melakukan perubahan besar!

-Redaksi-

SUSUNAN PENGURUS

Pelindung
Tuhan Yang Maha Esa
Dewan Penasihat
Jeremias Lemek, S.H.
Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.
Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Prof.M.Hawin, S.H.LL.M.Ph.D

Divisi Umum
Pemimpin Umum: Abraham Adi
Sekretaris Umum: Efie Handayani
Bendahara Umum: Arifanny Faizal

Divisi Redaksi
Pemimpin Redaksi: Erdha Widayanto
Redaktur Pelaksana: Halim Pradana
Sekar Banjaran Aji
Redaktur Kortem : Bunga DR Caesaria
Redaktur Mading: Bunga DR Caesaria
Putu Shanty
Redaktur Blog: Ageng Prabandaru
Christy Ulissa Situmeang
Awak Redaksi: Chandra Purnama Putra

Divisi Penelitian dan Pengembangan
Kepala Litbang: M.P. Ompusunggu
Kasubdiv Riset & Diskusi: Lusi Yolanda
Kasubdiv PSDM: Fransisca F.R.C
Staf Litbanng: Yohanes Aditya,
Benedictus Wisnu,
Pramudana Gian
Petrus Sian Edvansa

Divisi Perusahaan
Pemimpin Perusahaan: Mohamad Nurdin
Kasubdiv Marketing: Valeria Flossie
Kasubdiv PPD: Dyahwara
Kasubdiv MDF: Pitra Hadiwardoyo
Staf Perusahaan: Elisabet Regitta
Rini Amalina
Sativa Koeswojo

Tentang Sampul

Desain Sampul:
Erdha Widhayanto

Cover buletin kali ini masih menggunakan warna merah dan hitam sebagai warna yang dominan. Tiga wajah sosok bapak bangsa, Soekarno, Mohammad Yamin dan Soepomo tampak memandang penerapan Pancasila di era sekarang. Sementara itu, bangsa ini masih digerogoti kekerasan dan kerusuhan yang kerap terjadi. Lalu ke manakah tuah Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa?

DAFTAR ISI

Editorial

1 Kisah Negara Pancasila

Laporan Utama

Pancasila "Antara Ada dan Tiada" 4

Pancasila di Era Orde Baru 8

Laporan Khusus

13 Lakon Pancasila Sebagai Asas Tunggal Orde Baru

Parameter

Mempertanyakan Pancasila 17

Ius Constituendum

19 PSP UGM:Penyokong Jati Diri Bangsa

Seputar Kampus

Simpang Siur RUU Ormas 23

Opini

26 Korupsi Mengkhianati Pancasila

30 Sebuah Batasan dan Renungan

Sosok

Membumikan Pancasila a la Yudi Latif 33

Resensi

36 Negeri di Ujung Tanduk

Sastra

Kehilangan 39

KISAH NEGARA PANCASILA

Oleh Erdha Widayanto

Negara tidak mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar dalam masyarakat, juga tidak mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat, melainkan mengatasi segala golongan dan segala perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyatnya ...”
Prof. Dr. Mr. Sopeomo

Ada hal yang menarik jika kita mengamati lambang negara Burung Garuda. Dalam lambang negara tersebut, Burung Garuda digambarkan sebagai seekor burung yang berdiri kokoh dengan sebuah perisai di dadanya. Dalam perisai itu terdapat berbagai lambang yang mempunyai makna yang sangat mendalam bagi negara Indonesia. Lambang-lambang itulah yang menggambarkan dasar negara yang lebih dikenal dengan nama Pancasila.

Pada tanggal 1 Juni 1945, ditengah badai tekanan penjajah dan melalui sebuah rangkaian perdebatan yang panjang, lahirlah sebuah konsep kenegaraan yang dikenal dengan nama Pancasila. Adalah seorang putra pribumi bernama Ir. Soekarno yang pertama kali memperkenalkan nama ini. Dalam perumusannya sendiri, selain Ir. Soekarno setidaknya ada dua nama tokoh bapak bangsa yang memberikan sumbangsih pemikiran atas lahirnya Pancasila: Mr. Mohammad Yamin dan Prof. Dr. Mr. Soepomo. Masing-masing tokoh ini mempunyai konsep kenegaraan yang berbeda. Namun, atas dasar musyawarah mufakat dan semangat untuk memajukan Indonesia, perbedaan konsep yang diusung mampu dilebur menjadi konsep baru yang dituangkan dalam lima buah sila yang terbingkai indah dalam nama Pancasila.

Dalam perkembangannya, sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 kemudian menuangkan Pancasila secara resmi dalam Pembukaan UUD 1945. Saat itu juga Pancasila mendapatkan tempat tertinggi sebagai sebuah dasar dan ideologi bangsa. Dengan tertuangnya Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila telah diakui secara bersama-sama sebagai sebuah landasan dalam berbagai tindakan yang dilakukan oleh negara dan seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila telah memberikan arah yang jelas dan pasti tentang jalan kehidupan bangsa.

Keberadaan Pancasila ternyata telah memberikan sumbangsih yang sangat besar pada kehidupan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan mampu berdiiri dengan kokoh tanpa adanya

sebuah pondasi yang senantiasa menjadi penopangnya. Tanpa sebuah pondasi, bangunan dengan nama negara akan mudah mengalami goncangan bahkan akan runtuh dan binasa.

Tentunya bukan tanpa alasan mengapa Pancasila dikatakan sebagai sebuah dasar yang memberikan sumbangsih yang besar pada kehidupan negara. Jika dikaji lebih dalam, baik itu mulai dari proses perumusannya, materi muatannya sampai dengan perjuanagn untuk mempertahankannya, Pancasila mempunyai kisah sejarahnya sendiri.

Dari segi perumusannya, Pancasila merupakan hasil pemikiran para tokoh bapak bangsa. Pada saat itu, negara ini sedang berada dalam masa penjajahan yang mengkebiri kebebasan berpikir rakyat Indonesia. Dengan adanya keberanian tokoh-tokoh tersebut, akhirnya lahir berbagai konsep tentang kenegaraan. Dari berbagai konsep yang ternyata berbeda, para tokoh bapak bangsa ini melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan kata lain, perumusan Pancasila itu sendiri merupakan cerminan dari musyawarah mufakat untuk menciptkan sebuah dasar negara.

Kemudian jika dikaji dari materi muatannya, Pancasila yang jika diringkas memuat sila Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan telah mengakomodir kepentingan bangsa Indonesia. Hal tersebut menunjukan bagaiamana Pancasila berusaha untuk memberikan dasar dalam berbagai aspek dan sendi kehidupan rakyat Indonesia.

Tidak hanya sampai di situ saja, dalam perjuangan untuk mencapai eksistensinya, Pancasila pernah mengalami masa-masa yang sulit. Dalam perjalanannya, keberadaan Pancasila sebagai sebuah dasar negara ternyata tidak semulus dari harapan. Peristiwa pemberontaakan DII/TII yang berencana mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) berusaha secara paksa mengganti Pancasila dengan ideologi Islam. Tidak hanya sampai di situ, muncul juga pemberontakan G 30S/PKI yang diduga akan mengganti Pancasila dengan ideologi Komunis.

Saking pentingnya keberadaan Pancasila dalam kehidupan bangsa, negara kemudian mengeluarkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1979. Dalam ketetapan itu, digambarkan dengan tegas bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila menjadi sebuah dasar yang tak tergantikan keberadaannya.

Sudah hamnpir 68 tahun sejak lahirnya Pancasila, nampaknya pengamalan nilai-nilai Pancasila masih jauh dari harapan. Pasca peristiwa Reformasi 1998 yang kemudian memperkenalkan bangsa ini dengan istilah yang dinamakan demokrasi, membuat eksistensi Pancasila mulai dipertanyakan kembali. Keberadaaan Pancasila menjadi semakin kabur dalam kehidupan berbangsa sekalipun masih diakui sebagai dasar negara.

Tentunya belum hilang dalam ingatan kita tentang berbagai tindakan baik itu oleh negara ataupun rakyat sipil yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Banyaknya konflik tentang agama yang kemudian berujung pada kekerasan fisik menjadi ironi tersendiri. Belum lagi konflik horisontal antar Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) yang nampaknya belum hilang dari kehidupan masyarakat. Yang paling menyedihkan, perilaku para elite politik dan penguasa yang justru berkhianat pada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Padahal, sebagai pemimpin, tokoh-

tokoh tersebut harus mampu mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Berbagai permasalahan tersebut tidak akan lahir jika Pancasila tetap menjadi pegangan setiap manusia yang hidup di Negara Pancasila ini. Bukan hanya sebagai sebuh jargon yang diagung-agungkan tanpa pengamalan dalam tindakannya.

Kemerosotan pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi semua pihak, tak terkecuali pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Walaupun begitu, sudah selayakanya negara yang sudah berusia lanjut ini belajar dari sejarah kelahiran pondasinya sendiri. Semangat untuk mencapai musyawarah mufakat demi kemajuan Indonesia haruslah menjadi penggerak utama seperti yang yang telah ditunjukan para perumus Pancasila.

Pancasila sejatinya adalah sebuah pondasi yang menjadi dasar sebuah bangunan gedung yang bernama negara Indonesia. Pondasi tersebut hendaknya selalu menjadi pijakan tatkala bangunan tersebut diterpa oleh badai permasalahan. Niscaya, bangunan gedung akan langgeng dan berdiri kokoh menantang laju topan perkembangan zaman.(***)

sumber gambar ilustrasi: http://2.bp.blogspot.com/-SzqJVRBtRC8/UNnoDuOxpqI/AAAAAAAAEQM/4hrdCcPKgZA/s1600/ilustrasi+pancasila+(ipabionline).gif

Pancasila "Antara Ada dan Tiada"

Oleh Ahmad Halim Prada dan Efie Handayani

Teringat ketika jaman sekolah dasar, kita dituntut untuk menghafalkan lima sila dalam Pancasila. Ya, Pancasila merupakan satu kata keramat yang mampu mencengkeram siapapun untuk menjadi satu dan bersatu dalam satu genggaman.

Pendiri bangsa ini atau *founding fathers* tentu sudah mengambil langkah yang tepat untuk menciptakan dan memadukan lima buah kalimat sakral yang kemudian dinamakan "Pancasila" yang tak lain bertujuan untuk menyatukan kemajemukan pada negeri ini. Para *founding father* nampaknya sudah memikirkan jika negeri ini punya banyak warna yang beraneka ragam, maka potensi untuk terpecah belah semakin besar. Dasar itulah yang melatarbelakangi mereka untuk merumuskan Pancasila dengan harapan agar negeri ini bisa bersatu di bawah satu payung yakni Indonesia.

Pendiri bangsa ini tentu sudah memahami benar bahwa pemikiran-pemikiran dan makna-makna yang terkandung dalam Pancasila. Ini merupakan suatu hasil racikan yang sangat sempurna, kreatif, dan tentu mampu dijadikan acuan sebagai penyelesaian suatu masalah. Mereka tentu sudah memahami betul bahwa Pancasila merupakan suatu dasar yang kuat di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Bangsa yang notabene merupakan bangsa besar yang memiliki berbagai keunikan di setiap daerah di tengah-tengah ribuan pulau yang terhampar.

Dalam rentang masa yang telah terlewatkan, negeri ini dapat dikatakan berhasil. Berhasil dalam artian menyatukan perbedaan di bawah satu payung bernama Indonesia dengan Pancasila sebagai dasarnya. Tidak perlu teori yang berbelit-belit untuk tahu apa itu Pancasila dan gunanya bagi bangsa yang besar ini. Orang Indonesia hanya tahu kalau mereka harus bersatu, soal apakah itu sesuai dengan Pancasila itu bukan urusan mereka. Kita menikmatinya sebagai dasar yang mempersatukan negeri ini tanpa harus paham teorinya yang diberi label sebagai "Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila".

Namun, harapan besar pendiri bangsa ini tentu patut kita kaji kembali

menimbang kondisi masyarakat kita saat ini. Dalam studi yang dilakukan oleh berbagai pihak, terjadi fenoma yang mencengangkan yakni kemerosotan mengenai pengetahuan tentang Pancasila itu sendiri. Bagi sebagian kalangan, hal ini dianggap merupakan fenomena yang wajar, tapi jelas itu merupakan fenomena buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kemerosotan ini akan terjadi secara terus menerus dan berkesinambungan, maka bukan mustahil jika krisis kebangsaan ini akan jauh lebih buruk. Terlebih lagi hal tersebut dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mengatasi hal ini tentulah kita semua harus bahu-membahu membangun kembali semangat juang para *founding fathers.* Pendiri bangsa kita menginginkan bangsa ini bersatu dalam satu genggaman dengan landasan dasar yang telah mereka ciptakan dengan kuat yakni Pancasila.

Sulit memang untuk mempertahankan bahkan harus memperbaiki kemerosotan moral yang terjadi pada bangsa ini. Namun hal ini akan menjadi langkah nyata yang memang harus kita lakukan jika kita masih menginginkan kesatuan serta kesejahteraan bangsa. Harus optimis memang, sehingga yang kita butuhkan adalah upaya dan langkah yang nyata. Dengan demikian penyegaran terhadap pemahaman Pancasila dinilai sebagai suatu langkah yang nyata. Hal ini tidak sekedar hanya menuntut masyarakat bisa mengahafal kelima sila "sakti" secara baik dan benar. Namun hal yang lebih penting adalah upaya nyata untuk mendoktrinasisasi Pancasila secara sungguh-sungguh kepada seluruh elemen bangsa ini agar bisa menjadi suatu *problem solving* untuk memecahkan segala permasalahan terkait dengan bangsa ini.

Perlunya Penyegaran dalam Ber-Pancasila

Kondisi faktual yang terjadi di negeri ini masih jauh dari apa yang dikandung dalam Pancasila. Konflik antar etnis, suku, dan agama kerap kali pecah di berbagai tempat. Konflik Poso, Ambon, Sampit menjadi catatan hitam dalam kehidupan berbangsa. Belum lagi akhir-akhir ini terjadi pula konflik agraria di Mesuji, Kulon Progo dan masih banyak tempat lainnya. Hal ini menimbulkan tanya di mana Kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana Persatuan Indonesia. Sepertinya masih banyak dari kalangan kita yang lalai untuk memaknai Pancasila.

Dulu ketika rezim Soeharto berkuasa masyarakat sudah dijelali materi-materi tentang ke-Pancasilaan. Dengan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) rakyat di dorong untuk

menghafal pasal maupun 36 butir Pancasila. Namun kenapa pasca Orde Baru tumbang, hal tersebut tidak meninggalkan bekas. Hal tersebut dikarenakan pada masa itu diskusi tentang Pancasila terhenti. Digantikan oleh "Pemasyarakatan Pancasila" dengan apa yang disebut "Penataran P4" yang tentu saja menyesuaikan dengan pemahaman dan kehendak rezim.

Pemasyarakatan Pancasila melalui penataran P4 semasa Orde Baru tidak menghasilkan pemahaman yang mendalam, apalagi terhadap perilaku yang selaras dengan Pancasila. Bersikap kritis atau berani berdebat akan mendapat urutan bawah, bahkan tidak lulus penataran P4. Hal itu pernah dialami Amien Rais yang ketika itu menempati urutan bawah ketika mengikuti Penataran P4. Mengkritisi P4, baik substansi maupun metodologi, bukan berarti tidak Pancasilais. Soedjati Djiwandono, tokoh intelektual CSIS, sekitar tahun 1995 mengungkapkan penolakannya terhadap penataran P4. Tetapi dia menyatakan secara tegas bahwa dirinya seorang Pancasilais.

Membaca uraian di atas kita akan sedikit memahami, kenapa konflik horizontal maupun vertikal masih saja terjadi di negeri ini. Pemahaman Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam masyarakat kita belum tegak. Justru belakangan beberapa kalangan lebih tertarik untuk mengkaji, memahami, dan bahkan mempraktekkan ideologi atau pun budaya bangsa asing. Tak ada yang salah dengan hal itu. Namun juga tak semestinya kita silau terhadap budaya materi dan melupakan keluhuran budaya spiritual bangsa dan ideologi bangsa sendiri.

Banyaknya ideologi yang berkembang di Indonesia kini terkadang menimbulkan fanatisme sempit yang memicu konflik antar golongan. Kita tentu masih ingat tragedi di Cikeusik, GKI Yasmin, intimidasi terhadap warga Syi'ah di Madura. Tragedi tersebut merupakan contoh ekses dari fanatisme sempit. Jika masyarakat memahami Pancasila dengan penuh penghayatan, maka peristiwa tersebut tidak akan terjadi. Kami meyakini Pancasila mampu meredam fanatisme, pengaruh sekularisme atau pun fundamentalisme radikal. Fundamentalisme radikal ini pula yang ditengarai menjadi akar dari terror bom, yang kerap terjadi di Indonesia.

Di tengah globalisasi yang kian tak terbendung, masyarakat Indonesia dengan sangat mudah menerima apa pun termasuk budaya dari luar tanpa disaring terlebih dahulu. Sesungguhnya Pansasila merupakan filter budaya di negeri ini. Akan tetapi kenapa filter tersebut kini cenderung menjadi longgar ? Karena dulu para elite memperkosa budaya sendiri demi kepentingan politik sempit serta

menjadikan Pancasila sebagai payung untuk bertindak represif. Akhirnya ketika rezim represif tumbang, Pancasila sebagai kristalisasi budaya juga runtuh.

Maka sudah seharusnya segenap eleman bangsa memikirkan cara baru yang mengarah pada pemahaman baru terhadap Pancasila. Karena pada dasarnya Pancasila ini lentur untuk menyesuaikan dengan konteks kekinian tanpa meninggalkan jati diri bangsa yang sudah ada. Dengan ini diharapakan muncul gagasan baru, pemikiran baru yang konstruktif bagi bangsa ini. Interaksi dan komunikasi antar anak bangsa harus lebih diintensifkan sehingga terjalin keharmonisan dalam suatu negara. Hal ini merupakan bentuk langsung pengamalan Persatuan Indonesia.

Penyegaran dalam pola menumbuhkan kesadaran ber-Pancasila harus dilakukan secara inovatif. Mempertimbangkan kondisi riil yang ada, sehingga langkah tersebut efektif. Cara –cara semacam penataran P4 bisa saja diterapkan namun tentu dengan banyak koreksi, dan dengan kemasan baru. Sehingga diharapkan tak hanya hafalan pasal dan butir yang di dapat masyarakat, melainkan pemahaman. Hal ini juga merupakan upaya agar jangan terjadi lagi pengendapan Pancasila.

Kini, Pancasila antara ada dan tiada. Dia mengendap tak terlihat. Usaha pemahaman dan pengamalan Pancasila merupakan tanggungjawab bersama agar Pancasila tak sekedar menjadi pelengkap empat pilar berbangsa dan bernegara. (***)

sumber gambar ilustrasi:
http://i0.wp.com/www.berdikarionline.com/wp-content/uploads/2012/06/pancasila-kertas.jpg?fit=464%2C290

Pancasila di Era Orde Baru

Oleh Moses Parlindungan, Elisabet Regtta, Ageng Prabandaru

Era Orde Baru dalam sejarah republik ini merupakan masa pemerintahan yang terlama, dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Stabil dalam artian tidak banyak gejolak yang mengemuka, layaknya keadaan dewasa ini. Stabilitas yang entah semu atau memang riil tersebut, diiringi juga dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Era pembangunan, era penuh kestabilan, yang saat ini menimbulkan romantisme dari banyak kalangan di negara ini, ditandai dengan semakin gencarnya campaign "piye kabare" di seantero pelosok nusantara. Menariknya, dua hal yang menjadi warna Indonesia di era Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan, serta merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintah (baca: Soeharto) untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan; Pancasila begitu gencar ditanamkan nilai dan hakikatnya kepada rakyat; dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganjal, kala itu tentunya.

Gencarnya penanaman nilai-nilai Pancasila di era Orde Baru salah satunya dilatarbelakangi hal bahwa rakyat Indonesia harus sadar jika dasar negara Indonesia adalah Pancasila itu sendiri. "Masyarakat pada masa itu memaknai pancasila sebagai hal yang patut dan penting untuk ditanamkan", ujar Hendro Muhaimin, peneliti di Pusat Studi Pancasila UGM. Selain itu menurutnya pada era Orde Baru semua orang menerima Pancasila dalam kehidupannya, karena Pancasila sendiri adalah produk dari kepribadian dalam negeri sendiri, dan yang menjadi keprihatinan khalayak pada masa itu adalah Pemerintahnya, bukan Pancasilanya.

Hendro Muhaimin juga menambahkan bahwa Pemerintah di era Orde Baru sendiri terkesan "menunggangi" Pancasila, karena dianggap menggunakan dasar negara sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. "Pada dasarnya, yang salah bukanlah Pancasila, karena Pancasila dibuat dari penggalian kepribadian bangsa ini, dari cerminan bangsa Indonesia, maka para pemegang kekuasaan pada rezim itu, yang menggunakan Pancasila secara politis, adalah pihak yang seharusnya

bertanggungjawab akan gejolak-gejolak yang terjadi", ujarnya. Namun disamping hal-hal tersebut, penanaman nilai-nilai Pancasila di era Orde Baru juga dibarengi dengan praktik dalam kehidupan sosial rakyat Indonesia. Kepedulian antarwarga sangat kental, toleransi di kalangan masyarakat cukup baik, dan budaya gotong-royong kala itu sangat dijunjung tinggi.

Selain itu, contoh dari gencarnya penanaman nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari penggunaan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi, yang menyatakan bahwa semua organisasi, apapun bentuknya, baik itu organisasi masyarakat, komunitas, perkumpulan, dan sebagainya haruslah mengunakan Pancasila sebagai asas utamanya. Apabila ada asas-asas organisasi lain yang ingin ditambahkan sebagai asasnya, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, muncul juga anggapan bahwa Pancasila dianggap sebagai "pembius" bangsa, karena telah "melumpuhkan" kebebasan untuk berorganisasi.

Romantisme Pelaksanaan P4

Di era Orde Baru, terdapat kebijakan Pemerintah terkait penanaman nilai-nilai Pancasila, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Materi penataran P4 bukan hanya Pancasila, terdapat juga materi lain seperti UUD 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Wawasan Nusantara, dan materi lain yang berkaitan dengan kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme. Kebijakan tersebut disosialisaikan pada seluruh komponen bangsa sampai level bawah termasuk penataran P4 untuk siswa baru Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang lalu dilanjutkan di perguruan tinggi hingga di wilayah kerja. Pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh melalui Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dengan metode indoktrinasi. Dalam ungkapan Langenberg (1990), Orde Baru adalah negara dan sekaligus sistem negara (pemerintahan eksekutif, militer, polisi, parlemen, birokrasi, dan pengadilan), yang sejak 1965/1966 membangun hegemoni dengan formulasi ideologi sebagai tiang penyangganya.

Visi Orde Baru pada saat itu adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Hendro Muhaimin, ketika ditanya mengenai bagaimana Pancasila dimaknai oleh rakyat Indonesia pada saat itu jika dibandingkan dengan bagaimana rakyat memahaminya sekarang, ia berpendapat, "Kalau itu jelas berbeda, kalau orang pada waktu

dulu dalam memaknai Pancasila, kental sekali suasana Pancasilanya, maka orang sangat memaknai. Kalau bicara sekarang, sangat jauh dengan suasana dulu." Banyak masyarakat pada zaman itu dapat menghafalkan butir-butir Pancasila yang jumlahnya 36 butir, itu pun memang karena dampak dari pelaksanaan P4 bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan semakin dominannya kekuatan negara, nasib Pancasila dan UUD 1945 menjadi semacam senjata bagi pemerintahan Orde Baru dalam hal mengontrol perilaku masyarakat. Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang keramat sehingga tidak boleh diutak-atik maupun ditafsirkan dengan beberapa penafsiran. Seakan-akan ukurannya hanya satu: sesuatu dianggap benar kalau hal tersebut sesuai dengan keinginan penguasa, sebaliknya dianggap salah kalau bertentangan dengan kehendaknya. Sikap politik masyarakat yang kritis dan berbeda pendapat dengan negara dalam prakteknya malah dengan mudahnya dikriminalisasi.

Penanaman nilai-nilai Pancasila pada saat itu dilakukan tanpa sejalan dengan fakta yang terjadi di masyarakat, berdasarkan perbuatan pemerintah. Akibatnya, bukan nilai-nilai Pancasila yang meresap ke dalam kehidupan masyarakat, tetapi kemunafikan yang tumbuh subur dalam masyarakat. Sebab setiap ungkapan para pemimpin mengenai nilai-nilai kehidupan tidak disertai dengan keteladanan serta tindakan yang nyata, sehingga banyak masyarakat pun tidak menerima adanya penataran yang tidak dibarengi dengan perbuatan pemerintah yang benar-benar pro-rakyat.

Pancasila yang Begitu Diagung-Agungkan

Tidak salah jika menyebut era Orde Baru sebagai era "dimanis-maniskannya" Pancasila. Secara pribadi, Soeharto sendiri seringkali menyatakan pendapatnya mengenai keberadaan Pancasila, yang kesemuanya memberikan penilaian setinggi-tingginya terhadap Pancasila. Pada sebuah forum di tahun 1972, dalam sebuah kunjungannya ke Australia, Soeharto menyatakan bahwa kepribadian bangsa Indonesia terbentuk dari perjalanan sejarahnya, baik ketika dalam masa kegemilangan di era Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram, maupun ketika dalam fase penderitaaan di bawah penjajahan sepanjang tiga setengah abad. Kepribadian tersebut kemudian menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila, yang sila-silanya merupakan sebuah kesatuan yang bulat. Di dalamnya juga tersimpul mengenai kesadaran bangsa Indonesia

bahwa manusia tergantung pada keseimbangan-keseimbangan, antara manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, dan lahir dengan batin. Sebuah pemaparan ekselen, yang mungkin saja memang bertujuan untuk menarik perhatian "para bule hadirin" dalam forum tersebut, Australia-Indonesia Business Cooperation Committee.

Lain lagi ketika Soeharto memberikan pidato dalam Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1967. Soeharto mendeklarasikan Pancasila sebagai suatu force yang dikemas dalam berbagai frase bernada angkuh, elegan, begitu superior. Dalam pidato tersebut, Soeharto menyatakan Pancasila sebagai "tuntunan hidup", menjadi "sumber tertib sosial" dan "sumber tertib seluruh perikehidupan", serta merupakan "sumber tertib negara" dan "sumber tertib hukum". Kepada pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1974, Soeharto juga dengan lantang menyatakan, "Pancasila janganlah hendaknya hanya dimiliki, akan tetapi harus dipahami dan dihayati!" Dapat dikatakan tidak ada yang lebih kuat maknanya selain Pancasila di Indonesia, pada saat itu, dan dalam versi Orde Baru tentunya.

Pelaksanaan pemaparan materi P4 yang begitu digencarkan di era Orde Baru juga merupakan upaya dari Pemerintah untuk menghegemonikan keberadaan Pancasila di tengah rakyat Indonesia. Hendro Muhaimin, berpendapat bahwa tujuan dari dilaksanakannya pemaparan P4 sebenarnya baik, mengingat Pancasila adalah dasar negara, sudah seharusnya Warga Negara Indonesia memahami isi dan maksud dari Pancasila, ke depannya bertujuan membentuk Warga Negara Indonesia sebagai manusia yang ber-Pancasila. "Tujuannya memang sudah bagus dan mulia, tetapi salahnya karena terjadi banyak penyimpangan seiring berjalannya pemerintahan Orde Baru", ujarnya.

Demokrasi Pancasila: Wajah Semu Era Orde Baru

Termasuk di dalam P4, melalui Ketetapan MPR (TAP MPR) No. II/MPR/1978 (sudah dicabut), adalah 36 butir Pancasila sebagai ciri-ciri manusia Pancasilais. Pemerintah Orde Baru mengharapkan melalui 36 butir Pancasila, yang serta merta "wajib hukumnya" untuk dihafal, akan terbentuk suatu tatanan rakyat Indonesia yang mempraktikkan kesemuanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lalu terciptalah negara Indonesia yang adil dan makmur, jaya di segala bidang. Akan tetapi, justru penghafalan itu yang menjadi bumerangnya. Cita-cita yang terkembang melalui P4 hanya keluar dari mulut saja, tanpa ada pengamalan yang berarti untuk setiap butir yang

terkandung di dalamnya, meskipun tidak terjadi secara general. Sebagai contoh adalah mengenai pelaksanaan demokrasi di era Orde Baru. Berwajahkan "Demokrasi Pancasila", akan tetapi dalam kenyataannya bak jauh panggang dari api. "Penataran itu sifatnya hanya menghafal, kemudian mengenai proses pelaksanaan secara langsung dari 36 butir Pancasila, dulu melalui kegiatan seperti gotong-royong kerja bakti warga. Tetapi pelaksanaan demokrasi pada saat Orde Baru itu sangat minim", ujar Hendro Muhaimin.

Kebebasan tanpa koersi yang menjadi pilar utama dari prinsip demokrasi secara umum, dipadukan dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung melalui kelima silanya, sejatinya merupakan sebuah kombinasi yang apabila dilaksanakan sesuai hakikatnya oleh Pemerintah Orde Baru tentu akan memberikan dampak positif bagi kehidupan rakyat Indonesia pada saat itu. Akan tetapi, justru koersilah yang menjadi "senjata" pemerintah untuk menciptakan kehidupan yang, berdasarkan standar yang dibangun pada saat itu, bernuansa ketertiban dan keselarasan.(***)

sumber gambar ilustrasi:
http://hendromuhaimin.com/wp-content/uploads/2013/03/240601.jpg

Lakon Pancasila Sebagai Asas Tunggal Orde Baru

Oleh: Bunga Dita Rahma Cesaria, Petrus Sian Edvansa, dan Rini Amalia

Pancasila dirumuskan dan dipaparkan oleh Muhammad Yamin dan Soekarno dalam sidang BPUPKI. Lima sila dirancang untuk menjadi visi dan pedoman rakyat Indonesia dalam menjalankan kegiatan bernegara. Peristiwa ini menjadi sebuah sejarah kebangsaan, sebuah realisme pemikiran yang mengawali terbentuknya Republik Indonesia. Pancasila menjadi sebuah ladang pembelajaran dan cita-cita dari sebuah bangsa yang begini besar. Bangsa yang berpenduduk ratusan juta orang, bergaris pantai ribuan kilometer, dan mempunyai belasan ribu pulau. Namun ironi mulai terjadi ketika Pancasila sebagai buah ide nasionalisme kebangsaan kemudian diperalat dan digunakan sebagai corong pembenaran penguasa.

Dua dekade setelah dirumuskan, Pancasila kemudian telah berpeyorasi sedemikian rupa. Pancasila bukan lagi didudukkan sebagai sebuah dasar negara, namun lain daripada itu, sebagai sebuah berhala kebangsaan. Kebangkitan rezim otoriter Soeharto puluhan tahun lalu membawa sebuah perubahan yang cukup signifikan soal segala "isme-isme" yang muncul ke permukaan. Tak ada lagi ideologi dan asas sebuah perkumpulan yang beragam. Semua hanya satu: Pancasila. Perluasan arti Pancasila yang sembarangan sebagai ideologi bangsa, dikeramatkan oleh Orde Baru sebagai sebuah alat yang dapat membenarkan dan memuluskan sebuah otoritarianisme kekuasaan negara. Lima sila itu dijadikan alat dan senjata guna melicinkan segala tindakan megalomania penguasa rezim saat itu.

Indoktrinasi Pancasila sebagai satu-satunya asas yang mulia dan luhur dilakukan dengan berbagai cara. Pada zamannya, lazim terdengar yang namanya P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Tidak ada rakyat Indonesia didikan Orde Baru yang tidak mengenal indoktrinasi ini, dari anak kecil di pelosok dusun Sumatera, sampai para pejabat korup di ibu kota hafal 36 butir Pancasila yang dijabarkan pada P4 itu. Pancasila

ditempatkan sebagai sebuah ideologi yang superior, seakan-akan ideologi lain adalah sampah dan hanya Pancasila yang mampu menyelamatkan bangsa ini. Namun, yakinlah ketika Pancasila hanya dijadikan alat memuluskan kekuasaan dan kediktatoran seorang penguasa, sampai matipun Pancasila tidak akan dapat dijadikan pandangan dan dasar hidup manusia Indonesia yang merdeka. Lagi pula, Orde Baru sebagai garda utama dalam pengamalan dan penanaman Pancasila juga tak mampu menahan diri untuk mengkhianati Pancasila. Menakut-nakuti rakyat dengan senjata, pengaturan pemilihan umum, korupsi yang bersifat begitu masif, bagi-bagi proyek nasional pada sanak saudara, dan menekan kebebasan berpolitik warganya adalah juga bentuk pengkhianatan Pancasila pada masa Orde Baru oleh penguasa.

Pancasila yang disusun dengan 'indah' kemudian dijabarkan dengan lebih 'indah' lagi oleh pemerintah kala itu. Hal ini seakan menjadi penghiburan masyarakat di tengah keterbatasan yang dialami. Namun di sisi lain yang terjadi rakyat tidak diberikan ruang untuk mengkritisi penyelewengan yang dilakukan pemerintah. Perut rakyat dibuat kenyang, tetapi tidak dengan pikiran mereka yang dibiarkan kosong. Hanya gaung lima sila dari Pancasila saja yang diulang-ulang. Pemerintah Orde Baru boleh saja membuat Pancasila seindah mungkin. Tetapi, apakah pemerintah juga mengindahkan Pancasila dalam setiap kebijakannya?

Sekedar mengingatkan beberapa sila dalam Pancasila dan penyelewengan yang dilakukan pemerintah Orde Baru beberapa tahun silam. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemerintah Orde Baru menunjukkan ketidakpatuhannya terhadap sila ini dalam menangani Etnis Tionghoa. Salah satu butir dari sila ini menyinggung sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Etnis Tionghoa yang merupakan salah satu etnis tertua di Indonesia memiliki suatu agama atau kepercayaan tersendiri, yaitu Kong Hu Cu. Diskriminasi terhadap kepercayaan ini dimulai sejak terbitnya Instruksi Presiden pada tahun 1967 yang melarang semua jenis tradisi Tionghoa termasuk Kong Hu Cu dilaksanakan secara terbuka. Sehingga otomatis pemerintah saat itu juga melanggar butir lain dari sila pertama ini, yaitu menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Satu butir yang sederhana dari sila ini berbunyi 'tidak semena-mena terhadap orang lain'. Ironis ketika pada saat Orde Baru, butir sila ini juga disandingkan dengan butir lainnya yaitu 'berani membela

BHINNEKA TUNGGAL IKA

kebenaran dan keadilan'. Lalu masih ingatkah kita tentang penculikan-penculikan aktivis pada masa Orde Baru? Sebagaimana tujuan dari aktivis pada umumnya adalah membela kebenaran, seperti yang diamanatkan oleh Pancasila, pemerintah saat itu justru semena-mena membungkam mereka.

Pancasila digadang-gadang sebagai asas tunggal negara Indonesia. Namun sebagai asas tunggal, Pancasila hanya diterapkan bagi rakyat, bukan bagi pemerintah. Pemerintah Orde Baru selalu memiliki dua pilihan terhadap Pancasila saat itu, menggunakannya untuk melanggengkan kekuasaan atau malah tidak menggunakannya sama sekali. Pancasila hanya semata-mata sebagai alat. Pemerintah Orde Baru terkadang mengabaikan Pancasila dan membuat kebijakan semaunya. Ketika seseorang bersuara akan ketidakbenaran pemerintah, dengan mudah pemerintah Orde Baru membelokkan Pancasila untuk membasmi mereka yang bersuara tersebut.

Hal itu mengakibatkan adanya trauma bagi rakyat Indonesia pada Masa Reformasi ini. Penyalahgunaan Pancasila pada orde baru telah mengakibatkan absennya Pancasila dalam membangun bangsa dan negara. Kesalahan mendasar yang telah dilakukan oleh Orde Baru adalah pengaitan Pancasila pada rezim tertentu yang berpengaruh pada pemerintahan di Indonesia. Pemerintah yang seharusnya membela kepentingan rakyat guna kemakmuran dan kesejahteraan malah berbelok arah untuk mengutamakan kepentingan golongannya.

Penyalahgunaan Pancasila dengan mengaitkan Pancasila dengan rezim tertentu telah menimbulkan mistifikasi. Pada masa Orde Baru hal ini menjadi senjata ampuh untuk melanggengkan keinginan pemerintah dan penerapan kekuasaan berskala besar. Hal tersebut mengakibatkan munculnya demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila pada pergantian rezim di era Reformasi. Sebenarnya dengan adanya demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila pada era Reformasi sangat bertentangan dengan prinsip Negara Indonesia di mana Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang tidak boleh diubah sama sekali. Apabila terjadi perubahan pada dasar negara di mana tujuan dari negara itu bertumpu maka akan mengakibatkan kekacauan dalam melaksanakan struktur pemerintahan di suatu negara. Hal ini yang tengah terjadi di Indonesia.

B.J. Habibie pernah menyatakan bahwa Pancasila bukanlah representasi dari sekelompok orang. Namun merupakan dasar Negara Indonesia, sepanjang Indonesia ada, Pancasila akan selalu ada. Rezim apapun akan pergi menjadi masa lalu, tetapi dasar negara tidak

akan pergi. Apabila pemerintah Indonesia lebih dapat menelaah atas apa yang telah disampaikan oleh B.J. Habibie tadi, seharusnya pemeritah Indonesia sadar akan fungsi utama dari Pancasila sebagai ideologi negara bukan merupakan ideologi sekelompok orang.

Pada asasnya Pancasila bukan merupakan milik sebuah rezim tertentu. Namun Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia yang menjadi pedoman bangsa. Absennya Pancasila menimbulkan banyak polemik, antara lain dengan maraknya gerakan radikal berbasis agama yang telah mencederai Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan Indonesia.

Sejauh ini Pancasila sudah semakin jauh dari kehidupan Bangsa Indonesia. Pancasila hanya sebatas diakui sebagai dasar negara. Namun sila-silanya yang merupakan perwujudan atas dasar Negara Indonesia tidak dijalankan. Sehingga dirasakan perlunya rekonstruksi, reaktualisasi dan rektorasi dalam menjalankan pemerintahan berbasis Pancasila sebagaimana yang telah diikrarkan oleh para founding father. Dengan menggunakan Pancasila sebagai panduan dalam menjalankan pemerintahan dan menerapkan setiap silanya sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintahan yang seperti itulah yang diharapkan dapat menyelesaikan problematika yang semakin kompleks baik dari segi regional, nasional maupun internasional.

Pancasila memanglah sebuah cita-cita besar bangsa ini. Sebuah cita-cita luhur besama segenap rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan. Tetapi, akankah kita berusaha terus untuk menggapainya? Atau hanya diam dan terus menjadikan Pancasila menjadi sebuah dialektika dan sebagai pelengkap kurikulum saja? Almarhum W.S. Rendra pernah mengatakan: "Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata". Maka, marilah berjuang dengan segala daya dan upaya yang kita punya agar cita-cita besar ini tercapai, dan bukan hanya sekedar menjadi hafalan semata.(***)

sumber gambar ilustrasi:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/National_emblem_of_Indonesia_Garuda_Pancasila.svg/200px-National_emblem_of_Indonesia_Garuda_Pancasila.svg.png

Mempertanyakan Pancasila

Oleh Sekar Banjaran, Sativa Koeswojo, Lusi Yolanda, Shanti Krisnadevi, Yohanes Aditya

;Bulan Juni adalah bulannya Pancasila, bulan yang menjadi kelahiran ideologi dasar sekaligus pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari dua kata Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas.

Seperti yang tercantum pada paragraf ke-4 Preambule Undang-Undang Dasar 1945, lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni masih diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Di era globalisasi ini, banyak anak muda yang sudah mulai melupakan lima sendi Pancasila. Hal ini dapat dilihat dari tingkah laku mereka yang sudah tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh maraknya aksi anarkis dari para pelajar dan mahasiswa bahkan antar masyarakat adat di suatu daerah.

Melihat fenomena ini, kami awak MAHKAMAH melakukan polling terhadap 100 responden yang semuanya adalah mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Jajak pendapat dimaksudkah untuk mengetahui pandangan mahasiswa hukum terkait dengan fenomena ini.

Setelah dianalisis, sebenarnya 93% responden mengaku masih hafal kelima sila Pancasila. Tetapi hanya 57% yang menganggap nilai-nilai Pancasila masih efektif dalam kehidupan sekarang. Dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak lagi eksis di dalam kehidupan masyarakat meskipun banyak orang masih hafal sila-sila Pancasila.

Kemudian 53% responden mengatakan bahwa masyarakat Indonesia kurang menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menegaskan bahwa Pancasila hanya menjadi hafalan saja, nilai-nilainya kurang diterapkan. Dari 100 responden, 64% diantaranya mengaku sudah cukup dalam menerapkan nila-

nilai Pancasila dalam kehidupannya namun masih ada 16% akademika yang menganggap dirinya masih kurang dalam menerapkan lima sila Pancasila.

Berdasarkan fenomena ini, kami awak MAHKAMAH merasa tertarik untuk mencari tahu tentang relevansi Pancasila di Indonesia. Sebanyak 76% responden mengatakan Pancasila masih relevan diberlakukan di Indonesia. Hal ini menjadi tugas bangsa Indonesia untuk lebih mengamalkan nilai-nilai Pancasila, agar Pancasila tidak sekedar menjadi bahan hafalan namun sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang kokoh. Berikut hasil pemaparan polling yang awak MAHKAMAH lakukan.(***)

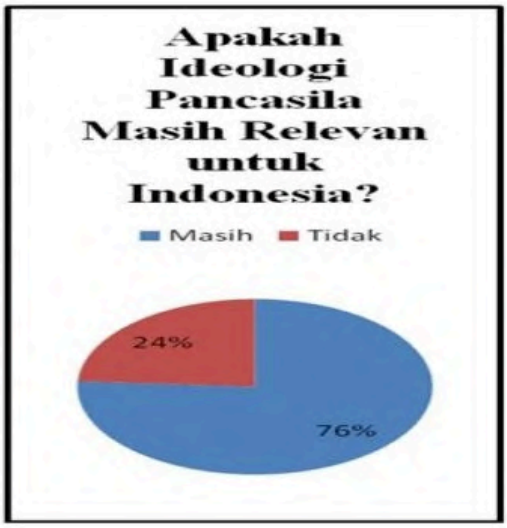

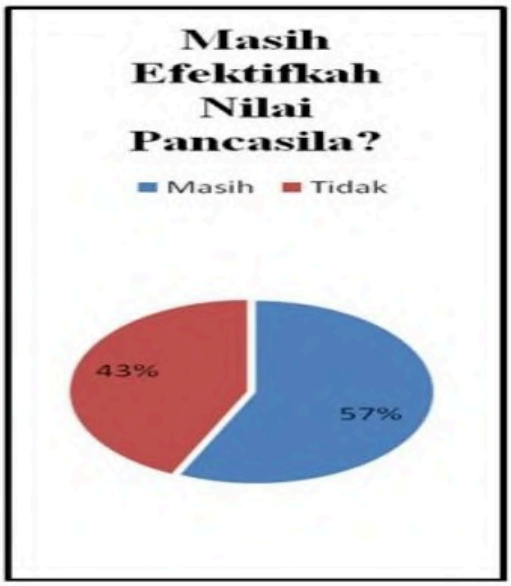

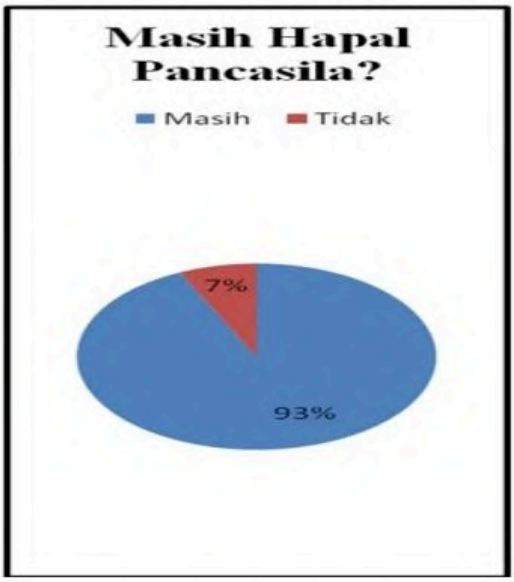

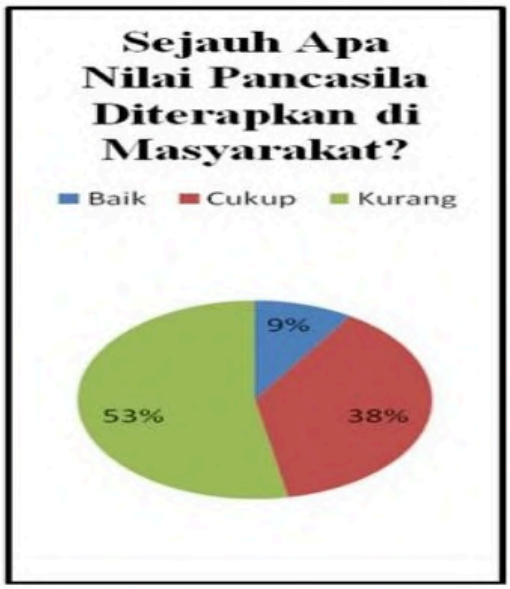

Pusat Studi Pancasila UGM : Penyokong Jati Diri Bangsa

Oleh: Pitra Aryani

Pancasila sebagai kebenaran yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pusat Studi Pancasila (PSP-UGM) merupakan sebuah sarana untuk mewujudkan dan memperkokoh jati diri bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. PSP-UGM ini berdiri pada tanggal 29 April 1995 dan diresmikan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: UGM/87/3966/UM/01/37 tanggal 12 Juli 1995. Berdirinya PSP-UGM, tidak hanya untuk menjadi sebuah organisasi yang sia-sia. Namun PSP-UGM ini didirikan dengan tujuan yang besar, yaitu untuk mengembangkan

Keberadaan PSP-UGM di lingkungan UGM itu sendiri merupakan sebuah aktualisai dari jati diri UGM sebagai "Universitas Pancasila" di Indonesia. UGM yang juga dikenal sebagai "Universitas Pancasila" yang menganut dan terikat pada kelima butir Pancasila tentunya dalam pelaksanaan segala kegiatannya juga mengamalkan butir-butir Pancasila tersebut. Maka dari itu, PSP-UGM ini mencanangkan berbagai kegiatan sebagai upaya pengembangan dan pengenalan Pancasila bagi para mahasiswa dan masyarakat, sehingga dalam hal ini para mahasiswa dan masyarakat tidak hanya pintar secara kognitif tetapi juga dalam tingkah laku.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka selama ini PSP-UGM telah melaksanakan berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan perkenalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena PSP-UGM masih berada di lingkungan perguruan tinggi, maka segala kegiatannya pun tak lepas dari tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat, peneltian, dan pendidikan.

Pengabdian masyarakat dilakukan melalui training kader-kader bangsa dengan mendidik anak-anak sampai usia mahasiswa untuk belajar bersama di suatu desa mengenai kegotongroyongan dan lomba mewarnai Pancasila untuk usia anak-anak. Penelitian itu sendiri dilaksanakan dengan cara pembudayaan dan realisasi nilai-nilai pancasila pada generasi muda terhadap era teknologi informasi yag berkembang pesat. Sedangkan pendidikan dilaksanakan melalui diskusi-diskusi rutin atau "kursus Pancasila" dan seminar-seminar berkaitan

dengan ideologi Pancasila serta segala hal yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila.

PSP-UGM juga menyelenggarakan Kongres Pancasila. Pada tanggal 31 Mei -1 Juni 2013 yang lalu, untuk memperingati hari Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni, PSP-UGM mengadakan Kongres Pancasila V. Kongres tersebut membahas mengenai strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam pembudayaan ke-Indonesia-an karena dirasa saat ini nilai-nilai luhur Pancasila sudah mulai luntur.

Selain kegiatan sebagaimana di atas, PSP-UGM juga melakukan publikasi baik melalui buku ataupun televisi (media elektronik) guna memperkuat jati diri bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila pada diri mahasiswa dan masyarakat. PSP-UGM telah menerbitkan beberapa buku yang berkaitan dengan Pancasila. Selain itu, publikasi mengenai Pancasila juga dilakukan melalui televisi, yaitu dengan membuat iklan layanan masyarakat. Oleh karena kedua media tersebut saat ini memiliki pengaruh yang besar, maka di harapkan pesan-pesan dan nilai-nilai Pancasila dapat diserap dengan baik.

Namun dalam pergerakannya PSP-UGM juga banyak menemui kendala dalam pembudayaan dan implementasi nilai-nilai Pancasila sesuai tridharma perguruan tinggi, yaitu tidak adanya *suplay* dan dukungan dari pemerintah. Seperti kita tahu pro kontra mengenai UU Pendidikan Tinggi di mana salah satunya menyebutkan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila tidak lagi menjadi matakuliah wajib bagi setiap universitas. Hal ini harusnya menjadi pukulan berat bagi bangsa ini. Bagaimana negara bisa berdiri pada pijakannya sendiri sementara ideologi bangsa sebagai fondasinya tidak diperkuat dan tidak diperkokoh. Kita bisa liat contoh yang lain dari efek reformasi Orde Baru yang melahirkan pemerintahan yang liberalisme, kolonialisme yang akhirnya melahirkan produk-produk hukum yang cacat, yang tidak lagi berasaskan demi keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seperti yang termaktub pada pembukaan UUD 1945 dan terkandung di dalam sila-sila Pancasila.

Hal inilah yang menjadikan pekerjaan rumah yang besar bagi PSP-UGM untuk membangkitkan semangat kita para akademisi-akademisi UGM yang dijuluki sebagai "Universitas Pancasila" untuk terus memegang komitmen sebagai bagian dari universitas untuk selalu mengembangkan kajian-kajian , seminar pelatihan dan kursus berkaitan dengan implementasi serta pembudayaan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai kebenaran yang hidup. Untuk itu dalam kegiatannya, PSP-UGM dioperasionalkan dan digerakan oleh universitas untuk terus mengadakan transformasi nilai Pancasila. Artinya lembaga studi seperti PSP-UGM harus terus dapat mengembangkan kajian nilai-nilai Pancasila agar dapat selalu diterapkan

oleh semua kalangan masyarakat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai jati diri bangsa Indonesia.

Walaupun dalam berkegiatan menggerakan generasi muda PSP-UGM tidak didukung sepenuhnya oleh negara, tetapi semangat para generasi muda penggerak motor PSP-UGM haruslah mendapat apresiasi yang tinggi dari kalangan akademisi universitas lain, masyarakat umum dan utamanya adalah negara. Karena PSP-UGM merupakan contoh di mana komitmen dan kesadaran akan nilai dalam sila-sila Pancasila yang dapat dikembangkan, diperdayakan dan diimplementasikan tidak akan membawa negara kita pada kemunduran. Justru hal tersebut akan membawa bangsa ini siap untuk bersaing dengan negara-negara lain, mengikuti arus globalisasi tanpa meninggalkan jati diri bangsa.

Indonesia-an karena dirasa saat ini nilai-nilai luhur Pancasila sudah mulai luntur.

Selain kegiatan sebagaimana di atas, PSP-UGM juga melakukan publikasi baik melalui buku ataupun televisi (media elektronik) guna memperkuat jati diri bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila pada diri mahasiswa dan masyarakat. PSP-UGM telah menerbitkan beberapa buku yang berkaitan dengan Pancasila. Selain itu, publikasi mengenai Pancasila juga dilakukan melalui televisi, yaitu dengan membuat iklan layanan masyarakat. Oleh karena kedua media tersebut saat ini memiliki pengaruh yang besar, maka di harapkan pesan-pesan dan nilai-nilai Pancasila dapat diserap dengan baik.

Namun dalam pergerakannya PSP-UGM juga banyak menemui kendala dalam pembudayaan dan implementasi nilai-nilai Pancasila sesuai tridharma perguruan tinggi, yaitu tidak adanya *suplay* dan dukungan dari pemerintah. Seperti kita tahu pro kontra mengenai UU Pendidikan Tinggi di mana salah satunya menyebutkan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila tidak lagi menjadi matakuliah wajib bagi setiap universitas. Hal ini harusnya menjadi pukulan berat bagi bangsa ini. Bagaimana negara bisa berdiri pada pijakannya sendiri sementara ideologi bangsa sebagai fondasinya tidak diperkuat dan tidak diperkokoh. Kita bisa liat contoh yang lain dari efek reformasi Orde Baru yang melahirkan pemerintahan yang liberalisme, kolonialisme yang akhirnya melahirkan produk-produk hukum yang cacat, yang tidak lagi berasaskan demi keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seperti yang termaktub pada pembukaan UUD 1945 dan terkandung di dalam sila-sila Pancasila.

Hal inilah yang menjadikan pekerjaan rumah yang besar bagi PSP-UGM untuk membangkitkan semangat kita para akademisi-akademisi UGM yang dijuluki sebagai "Universitas Pancasila" untuk terus

memegang komitmen sebagai bagian dari universitas untuk selalu mengembangkan kajian-kajian , seminar pelatihan dan kursus berkaitan dengan implementasi serta pembudayaan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai kebenaran yang hidup. Untuk itu dalam kegiatannya, PSP-UGM dioperasionalkan dan digerakan oleh universitas untuk terus mengadakan transformasi nilai Pancasila. Artinya lembaga studi seperti PSP-UGM harus terus dapat mengembangkan kajian nilai-nilai Pancasila agar dapat selalu diterapkan oleh semua kalangan masyarakat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai jati diri bangsa Indonesia.

Walaupun dalam berkegiatan menggerakan generasi muda PSP-UGM tidak didukung sepenuhnya oleh negara, tetapi semangat para generasi muda penggerak motor PSP-UGM haruslah mendapat apresiasi yang tinggi dari kalangan akademisi universitas lain, masyarakat umum dan utamanya adalah negara. Karena PSP-UGM merupakan contoh di mana komitmen dan kesadaran akan nilai dalam sila-sila Pancasila yang dapat dikembangkan, diperdayakan dan diimplementasikan tidak akan membawa negara kita pada kemunduran. Justru hal tersebut akan membawa bangsa ini siap untuk bersaing dengan negara-negara lain, mengikuti arus globalisasi tanpa meninggalkan jati diri bangsa.

sumber gambar ilustrasi:
http://www.dnaberita.com/foto_berita/11UGM.jpg

SIMPANG SIUR RUU ORMAS

Oleh: Erdha Widayanto

Pusat Studi Pancasila (PSP-UGM) merupakan sebuah sarana untuk mewujudkan dan memperkokoh jati diri bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. PSP-UGM ini berdiri pada tanggal 29 April 1995 dan diresmikan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: UGM/87/3966/UM/01/37 tanggal 12 Juli 1995. Berdirinya PSP-UGM, tidak hanya untuk menjadi sebuah organisasi yang sia-sia. Namun PSP-UGM ini didirikan dengan tujuan yang besar, yaitu untuk mengembangkan Pancasila sebagai kebenaran yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keberadaan PSP-UGM di lingkungan UGM itu sendiri merupakan sebuah aktualisai dari jati diri UGM sebagai "Universitas Pancasila" di Indonesia. UGM yang juga dikenal sebagai "Universitas Pancasila" yang menganut dan terikat pada kelima butir Pancasila tentunya dalam pelaksanaan segala kegiatannya juga mengamalkan butir-butir Pancasila tersebut. Maka dari itu, PSP-UGM ini mencanangkan berbagai kegiatan sebagai upaya pengembangan dan pengenalan Pancasila bagi para mahasiswa dan masyarakat, sehingga dalam hal ini para mahasiswa dan masyarakat tidak hanya pintar secara kognitif tetapi juga dalam tingkah laku.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka selama ini PSP-UGM telah melaksanakan berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan perkenalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena PSP-UGM masih berada di lingkungan perguruan tinggi, maka segala kegiatannya pun tak lepas dari tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat, peneltian, dan pendidikan.

Pengabdian masyarakat dilakukan melalui training kader-kader bangsa dengan mendidik anak-anak sampai usia mahasiswa untuk belajar bersama di suatu desa mengenai kegotongroyongan dan lomba mewarnai Pancasila untuk usia anak-anak. Penelitian itu sendiri dilaksanakan dengan cara pembudayaan dan realisasi nilai-nilai pancasila pada generasi muda terhadap era teknologi info rmasi yag berkembang pesat. Sedangkan pendidikan dilaksanakan melalui diskusi-

diskusi rutin atau "kursus Pancasila" dan seminar-seminar berkaitan dengan ideologi Pancasila serta segala hal yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila.

PSP-UGM juga menyelenggarakan Kongres Pancasila. Pada tanggal 31 Mei -1 Juni 2013 yang lalu, untuk memperingati hari Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni, PSP-UGM mengadakan Kongres Pancasila V. Kongres tersebut membahas mengenai strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam pembudayaan ke-Indonesia-an karena dirasa saat ini nilai-nilai luhur Pancasila sudah mulai luntur.

Selain kegiatan sebagaimana di atas, PSP-UGM juga melakukan publikasi baik melalui buku ataupun televisi (media elektronik) guna memperkuat jati diri bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila pada diri mahasiswa dan masyarakat. PSP-UGM telah menerbitkan beberapa buku yang berkaitan dengan Pancasila. Selain itu, publikasi mengenai Pancasila juga dilakukan melalui televisi, yaitu dengan membuat iklan layanan masyarakat. Oleh karena kedua media tersebut saat ini memiliki pengaruh yang besar, maka di harapkan pesan-pesan dan nilai-nilai Pancasila dapat diserap dengan baik.

Namun dalam pergerakannya PSP-UGM juga banyak menemui kendala dalam pembudayaan dan implementasi nilai-nilai Pancasila sesuai tridharma perguruan tinggi, yaitu tidak adanya *suplay* dan dukungan dari pemerintah. Seperti kita tahu pro kontra mengenai UU Pendidikan Tinggi di mana salah satunya menyebutkan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila tidak lagi menjadi matakuliah wajib bagi setiap universitas. Hal ini harusnya menjadi pukulan berat bagi bangsa ini. Bagaimana negara bisa berdiri pada pijakannya sendiri sementara ideologi bangsa sebagai fondasinya tidak diperkuat dan tidak diperkokoh. Kita bisa liat contoh yang lain dari efek reformasi Orde Baru yang melahirkan pemerintahan yang liberalisme, kolonialisme yang akhirnya melahirkan produk-produk hukum yang cacat, yang tidak lagi berasaskan demi keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seperti yang termaktub pada pembukaan UUD 1945 dan terkandung di dalam sila-sila Pancasila.

Hal inilah yang menjadikan pekerjaan rumah yang besar bagi PSP-UGM untuk membangkitkan semangat kita para akademisi-akademisi UGM yang dijuluki sebagai "Universitas Pancasila" untuk terus memegang komitmen sebagai bagian dari universitas untuk selalu mengembangkan kajian-kajian , seminar pelatihan dan kursus berkaitan dengan implementasi serta pembudayaan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai kebenaran yang hidup. Untuk itu dalam kegiatannya, PSP-UGM dioperasionalkan dan digerakan

oleh universitas untuk terus mengadakan transformasi nilai Pancasila. Artinya lembaga studi seperti PSP-UGM harus terus dapat mengembangkan kajian nilai-nilai Pancasila agar dapat selalu diterapkan oleh semua kalangan masyarakat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai jati diri bangsa Indonesia.

Walaupun dalam berkegiatan menggerakan generasi muda PSP-UGM tidak didukung sepenuhnya oleh negara, tetapi semangat para generasi muda penggerak motor PSP-UGM haruslah mendapat apresiasi yang tinggi dari kalangan akademisi universitas lain, masyarakat umum dan utamanya adalah negara. Karena PSP-UGM merupakan contoh di mana komitmen dan kesadaran akan nilai dalam sila-sila Pancasila yang dapat dikembangkan, diperdayakan dan diimplementasikan tidak akan membawa negara kita pada kemunduran. Justru hal tersebut akan membawa bangsa ini siap untuk bersaing dengan negara-negara lain, mengikuti arus globalisasi tanpa meninggalkan jati diri bangsa.

Sebagai contoh, pemerintah dapat memperdayakan media-media sosial elektronik maupun media cetak untuk membuat iklan layanan masyarakat guna membentuk dan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai implementasi nilai-nilai ideologi bangsa yang telah mulai ditinggalkan teruatama oleh generasi muda. Ini menjadi hantaman keras bagi pemerintah untuk benar-benar memperbaiki tatanan negara agar tidak kehilangan jati diri bangsanya sendiri. Salah satunya dengan memberikan dukungan serta aprsesiasi setinggi-tingginya kepada lembaga-lembaga pusat studi Pancasila tidak hanya di UGM saja yang dengan kesadaran tinggi mau membangkitkan lagi semangat dari nilai Pancasila terhadap implementasi kehidupan berbangsa.

Pergerakan dan operasional dari PSP-UGM tidak terlepas dari dukungan kita para akademisi dan masyarakat yang punya kesadaran tinggi akan rapuhnya ideologi bangsa, sehingga melalui PSP-UGM ini diharapkan bisa ikut saling menjaga elemen-elemen intern terpenting yang dibutuhkan sebuah bangsa yaitu ideologi. Tanpa ideologi kita bukanlah apa-apa, tanpa ideologi bangsa kita bukanlah siapa-siapa. PSP-UGM ada karena kesadaran dan komitmen, begitu pula negara ini ada karena kesadaran dari perjuangan para *founding father* serta rakyat untuk mewujudkan bangsa yang berideologi, berjati diri agar tidak mudah terjajah kembali seperti 350 tahun yang lalu. Pancasila hadir ibaratkan baju besi yang diciptakan untuk melindungi bangsa ini, melindungi jati diri bangsa dari pengaruh globalisasi dan perkembangan IPTEK yang sudah mulai melunturkan jati diri kita.(***)

OPINI ALUMNI MAHASISWA FH UGM

Korupsi Mengkhianati Pancasila

Di sebuah forum ada salah seorang Mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengatakan, “Marilah kita mengenangkan arwah-arwah kita”. Sontak kalimat itu direspon oleh Ir (HC) Soekarno dengan penuh kebanggaan, “Kok kebenaran Gadjah Mada punya mahasisiwi begitu itu”. Konon nama mahasiswi itu adalah Lina.

Lina mengingatkan forum di Universitas Gadjah Mada agar para pemimpin dapat merasakan tanggung jawab mereka dengan seksama. Otokritik yang dibangun oleh Lina adalah bagian agar bangsa ini memiliki landasan yang jelas untuk bisa melahirkan kepemimpinan yang melayani dan bukan untuk dilayani. Kalimat itu muncul di tengah Indonesia sedang menghadapi situasi Demokrasi Terpimpin. Soekarno kemudian menjelaskan Demokrasi Terpimpin itu ibarat sebuah konser di mana di sana ada dirigen dan ada ratusan pemain musik seperti terompet, trombone, gitar, jidor, dan lain sebagainya. Selain alat musik itu, ada juga kertas not yang diibaratkan sebagai blue print dari sebuah pembangunan. Disini terletak sebuah kolaborasi yang menakjubkan antara para ahli di bidang hukum, ekonomi, tekhnologi, pertanian, dan lain sebagainya dalam rangka untuk mewujudkan manifesto kolektif yakni Blue Print tadi. Kepemimpinan menurut Soekarno adalah untuk melahirkan kerja-kerja yang “merdu”.

Namun, apakah sosok Lina kini ada di tengah kita ? Menemani kita untuk selalu ingat akan tugas dan peran kita di setiap jengkal perjuangan ? Sayang, justru yang muncul dan ramai saat ini adalah berita-berita alumni UGM yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi di negara ini.

Sungguh naif jika kita memandang bahwa isu korupsi bukan sesuatu yang penting. Dari sinilah kita telah salah memulai hidup ini. Beberapa aktivis yang dulu melawan sebuah rezim dengan isi

tuntutan reformasi salah satunya adalah untuk memberantas Korupsi, Kolusi dabn Nepotisme (KKN) malah yang terjadi sebaliknya. Para tersangka korupsi yang kini berada di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah politisi-politisi muda ditambah sederet pengusaha muda.

Anehnya lagi, mereka yang menjadi tersangka korupsi adalah orang-orang yang memiliki pendidikan yang baik. Kemudian muncul sebuah hipotesis, apakah benar korupsi hanya bisa diakses oleh orang-orang berpendidikan saja ? Sementara orang-orang yang tidak berpendidikan justru tidak bisa melakukan itu ? Pertanyaan berikutnya, kemana peran kampus selama ini ?

UGM yang merupakan kampus warisan bangsa ini pernah memberikan Gelar Honoris Causa kepada Ir Soekarno. Gelar ini diberikan secara langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof. Notonagoro yang kemudian menyampaikan pidato begitu berkelas dengan judul "Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia". Naskah pidato ini sampai saat ini sering dikutip dan menjadi rujukan banyak orang.

Soekarno memang bukan pencipta, namun sebagai penggali Pancasila tidak pernah merasa memonopoli sejarah. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Pancasila bukanlah "agama baru". Pancasila hanyalah sebagai weltanschauung atau pandangan hidup saja. Pandangan hidup ini yang perlu untuk dijadikan alat untuk melihat masa depan dengan baik. Alangkah nistanya jika bangsa ini telah merasakan aroma reformasi selama 15 tahun, akan tetapi, praktek KKN masih tak kunjung usai.

Benar yang penulis sampaikan pada judul di atas, "Korupsi Mengkhianati Pancasila". Korupsi bukan saja merugikan keuangan negara, jauh lebih dari itu, korupsi telah melahirkan sebuah kebudayaan baru untuk secara konsisten dan bersama-sama membangkrutkan negara ini.

Ada beberapa bentuk pengkhianatan dari korupsi terhadap Pancasila. Pertama, korupsi telah meniadakan Tuhan sebagai titik sentral dari keberangkatan Pancasila. Korupsi Al-Quran seperti yang baru saja diputuskan oleh Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi (Tipikor) telah melukai perasaan umat Islam yang memenuhi bangsa ini. Kejadian ini menjadi tanda bahwa agama telah digeser oleh hal-hal lain. Kedua, sudah tidak ada lagi manusia yang adil dan beradab. Masih ingatkah kita dengan Yap Thiam Hien? Beliau adalah Advokat keturunan China yang dibesarkan di Universitas Leiden dan hidup untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) kaum papa di Indonesia. Dalam pledoi Yap saat dirinya didakwa melakukan pencemaran nama baik dua pejabat negara pada tahun 1968, Yap menyampaikan, "Tugas utama pengadilan ialah mencari dan menemui kebenaran". Dari situ kita melihat bahwa "kebenaran" adalah tangga menuju "keadilan". Yap mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjadi seorang yang adil dan beradab adalah dengan menjadi malaikat bagi orang-orang yang termarjinalkan dan membutuhkan pertolongan kita. Ketiga, korupsi telah memecah persatuan bangsa ini. Partai Politik pisah ranjang, KPK diserang, aktivis kehilangan acuan. Pemberantasan korupsi bukan semakin kuat, justru semakin dilemahkan oleh korupsi. Keempat, jarang sekali kita menemukan birokrasi yang melayani. Birokrasi kemudian merampok uang-uang rakyat secara bertahap dan illegal. Baru di beberapa daerah saja yang kemudian memiliki sistem yang mematuhi prinsip Good Governance. Dalam konteks demokrasi, kita kehilangan substansi. Demokrasi selalu dipandang hanya pada sisi prosedural saja. Padahal jauh dari itu, demokrasi seharusnya tidak menghasilkan para pemburu rente karena terjebak pada persoalan "uang". Sistem pemilihan umum dan kepala daerah perlu dikaji ulang. Dan kelima, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini adalah yang terbesar kedua di dunia setelah China dengan rata-rata 6%. Akan tetapi, tidak ada Trickle Down Effect di situ. Rakyat jelata tidak merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Kemana uang itu pergi ? Baru-baru ini kita melihat lagi tertangkapnya beberapa rekan Gayus Tambunan di Direktorat Jenderal Pajak. Kembali lagi mereka adalah generasi muda yang seharusnya sedang aktif melakukan

perlawanan dan perbaikan sistem. Daya serap pajak yang jebol itulah yang menyebabkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kita tak kunjung membaik dan terus terjadi kebocoran di sana-sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya ditutup dengan pencabutan subsidi secara bertahap akibat defisit APBN dan alasan lainnya.

Persoalan di atas bukan untuk diukur, tapi untuk menjadi pemantik kita agar masa depan bisa lebih baik. Kampus yang seharusnya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut justru terjebak pada nilai kaku yang tidak menampakan kesungguhannya dalam mendidik bangsa ini. Korupsi sudah membangkang dari dasar negara ini yaitu Pancasila. Tugas kampus adalah melahirkan generasi yang anti korupsi agar semua sistem di bangsa ini bisa segera dibenahi dan diatasi. Tugas kaum intelektual adalah mengembalikan tatanan yang baik ke tempatnya. (***)

sumber gambar ilustrasi:

http://manajemenppm.files.wordpress.com/2013/06/ilustrasi-bisnis-butuh-kristalisasi-pancasila-2.jpg?w=181&h=210

OPINI MAHASISWA FH UGM

Pancasila sebagai Ideologi Terbuka : sebuah Batasan dan Renungan

Oleh : Diantri Karin

Dewasa ini kita pasti sudah sering mendengar mengenai banyaknya pemberitaan mengenai sikap pemerintah yang tidak sesuai lagi dengan konstitusi Indonesia, bahkan ideologi negara Indonesia yakni Pancasila. Sebagai contoh, kita dapat menilik isu neo-liberalisme pada waktu pemilu presiden 2009 terkait dengan sikap Susilo Bambang Yudhoyono, yang pada saat itu mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia, memutuskan menggaet Boediono sebagai wakil presiden. Neo-liberalisme, liberalisme, dan sosialisme sama halnya dengan kapitalisme dan komunisme, merupakan ideologi yang dianggap tidak sesuai dengan pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, baik dari filsafatnya maupun inti pemikirannya. Sehingga dalam pengamalan kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ideologi tersebut ditentang keras dan dianggap tabu untuk masuk kedalam bangsa ini.

Namun jika ditilik lebih lanjut, dalam pembelajaran pendidikan Pancasila disebutkan bahwa pancasila merupakan ideologi yang terbuka. dalam perumusan pancasila itu sendiri di dalam sidang BPUPKI, Dr. Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua sidang, menyatakan dasar negara yang akan dibentuk (Pancasila) berawal dari mencari nilai-nilai dasar yang sama dalam kemajemukan budaya masyarakat kita dan menyarankan penerimaannya demi persatuan dan kesatuan. Dalam perkembangannya, kemajemukan budaya di masyarakat kita kala itu sangat beragam. Hal itu kemudian membuahkan NASAKOM yang terdiri kaum nasionalis, kaum agamis, dan kaum komunis di masa orde lama. Hal itu merupakan bagian dari konsesus politik pancasila. Dari kontrasnya sejarah tersebut dan isu-isu yang timbul di masa kini, maka tidaklah heran jika pada akhirnya muncul pertanyaan: sejauh mana keterbukaan nilai-nilai pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dan bagaimana membentengi nilai-nilai tersebut di era globalisasi ini?

Apakah yang dimaksud pancasila sebagai ideologi terbuka itu? Dalam makalah "Pancasila Sebagai Ideologi, Sebuah Renungan Awal" yang

ditulis oleh Moerdiono, pancasila sebagai ideologi terbuka adalah bahwa nilai dasarnya tetap, namun penjabarannya dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui, Pancasila memang sengaja dibatasi dalam bentuk aturan-aturan pokok dan merupakan suatu kerangka dasar saja. Hal ini bermakna untuk penerapannya di masa-masa yang akan datang. Nilai-nilai yang bersifat dasar dan dinamis tersebut memudahkan Pancasila untuk tetap hidup di dalam bangsa Indonesia serta menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini yang memberi bukti bahwa dari awal Pancasila sudah dimaksudkan bersifat sebagai ideologi terbuka.

Penerimaan Pancasila sebagai ideologi terbuka ini tentunya memberikan implikasi di dalam masyarakat dan pemerintahan dalam berbangsa dan bernegara, yakni memperdalam pemahaman akan nilai-nilai dasar Pancasila, pengembangan wawasan, doktrin, kebijakan, strategi, dan hukum nasional, serta mempersiapkan dan membangun kebiasaan masyarakat untuk setia kepada nilai-nilai moral serta norma hukum[i]. Jika pengimplikasian tersebut berjalan, pancasila sebagai ideologi terbuka tidak akan melemah, melainkan akan bertambah kuat karena digunakan dan diamalkan terus menerus dalam dinamika kehidupan bangsa.akan tetapi, tentu dalam penerimaan Pancasila sebagai ideologi terbuka ini memiliki batasan. Dalam makalah "Pancasila sebagai Ideologi Terbuka", Moerdiono menekankan bahwa keterbukaan nilai-nilai Pancasila terletak pada keterbukaan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar pada tataran nilai instrumentalnya, bukan pada tataran nilai dasarnya. Nilai-nilai dasar yang terkandung pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sudah tidak dapat diganggu gugat dan bahkan tidak dapat diubah satu kata pun karena pengubahannya berarti sama dengan pembubaran negara. Yang menjadi sorotan, tentu ada pada kebijakan pemerintahan yang lain seperti undang-undang dan peraturan perundangan lainnya. Hal-hal tersebut wajib ditinjau secara berkala agar tetap aktual dan sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia.

Sebagai contoh adalah mengenai amandemen UUD 1945 Pasal 33 tentang penyelenggaraan perekonomian Indonesia, yang tidak dilakukan karena tidak ingin menimbulkan permasalahan-permasalahan lebih lanjut, maka pada akhirnya topik berganti dengan menambahi nilai-nilai kapitalisme pada Pancasila, yakni perubahan perekonomian Indonesia yang bergerser dari "kiri" ke "kanan" meskipun tidak mengubah konstitusi dan dasar negara yang telah kita pegang teguh[ii]. Hal ini tentunya menjadi suatu friksi dan

membandingkan apa yang menjadi dasar (teori) dan pelaksanaannya. Dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi atau dasar negara tetap harus dimenangkan, karena dasar Pancasila bukanlah sesuatu yang semestinya diubah dalam rangka menyesuaikan keadaan, tetapi keadaanlah yang harus disesuaikan mengikuti suatu bentuk dasar tersebut.

Dari contoh di atas dapat kita tarik batasan keterbukaan pancasila itu terhadap terhadap ideologi lain (misal Liberalisme, Sosialisme, Komunisme, dan Kapitalisme), yakni merupakan suatu larangan bagi ideologi lain untuk masuk ke dalam nilai-nilai ideologi bangsa kita, sekali lagi, meskipun Pancasila merupakan ideologi terbuka. Moerdiono dalam makalah "Pancasila sebagai Ideologi Terbuka" menyatakan keterbukaan ideologi Pancasila pada tataran nilai instrumental tidak berarti bahwa kita juga membuka diri kepada wawasan faham komunisme (faham ideologi lain) ini, sebaliknya kita harus waspada akan ancaman-ancaman yang bisa datang dari ideologi lain tersebut.

Konstitusi, dasar negara, serta ideologi adalah hal yang fundamental bagi setiap bangsa. Begitu juga bangsa Indonesia yang sedari awal kemerdekaan telah berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keduanya merupakan aspek mutlak, terlebih lagi dalam kesempatan ini, ideologi negara yakni Pancasila merupakan sumber dari segala sumber kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa ini, maka sudah seharusnya setiap aspek kehidupan bangsa dilandaskan kepada nilai-nilai Pancasila dan sesuai dengan apa yang telah dituangkan serta diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Jika ditilik kembali, sebenarnya yang jadi permasalahan utama adalah sudahkan bangsa Indonesia menjalankan dengan baik dan benar sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara dari Pancasila itu sendiri. Sektor-sektor ekonomi Pancasila selama ini belum dimaksimalkan dan penerapannya belun terlihat, sehingga wajar saja jika tidak memberikan hasil yang maksimal pula.

Pancasila adalah dasar negara kita, dasar dalam menjalankan berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita mengamalkan dan menerapkan nilai-nilainya dalam rangka menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi.(***)

sumber gambar ilustrasi:
http://www.sherschoolofwisdom.org/wp-content/uploads/2013/04/Contemplation.jpg

---

[i] *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.* Hlm 410-417. 1992

[ii] Ekonomi Inkonstitusional

Membumikan Pancasila a la Yudi Latif

Oleh: Mohamad Nurdin

Penghayatan pancasila sebagai wawasan kebangsaan menemui titik jenuhnya. Perasaan dan kepemilikan atas identitas pancasilais menjelma sebagai kumpulan 'rasa' yang kelu. Penghayatan sebagai monumentasi internal 'rasa' tersebut secara perlahan terkikis ditengah hingar bingar kehidupan keseharian.

Linimasa bangsa yang kehilangan identitas sudah nampak jelas ekstrapolasinya. Ini diprediksi sebagai faktor penting penurunan bermacam ukuran bangsa dan negara. Banyak literatur menyebutkan bahwa identitas adalah karya politik yang mendasari nilai-nilai. Nilai-nilai ini kemudian bersenyawa dengan kehidupan hingga berakhir sebagai tindakan nyata. Jika selama ini pendekatannya adalah kondisi tindakan nyata yang kemudian ditarik ke nilai-nilai, maka pemahaman ini disarankan untuk dievaluasi. Pada dasarnya pendekatan yang baik tentunya melihat kedalam untuk diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika melihat kedalam inilah yang kemudian seharusnya muncul adalah pancasila.

Pancasila banyak memiliki bentuk pemaknaan. Interpretasi ini muncul sebagai state fundamental norm, dasar negara, pilar bangsa sampai pandangan pribadi individu-individu Indonesia. Krisis yang terjadi belakangan tentu memiliki banyak faktor. Tapi, apabila diselidiki lebih dalam akan ditemukan bahwa politik identitas, baik sebagai individu maupun sebagai bagian bangsa Indonesia, berperan penting dalam mengurai krisis untuk kemudian sedikit demi sedikit menyelesaikannya.

Persoalan diatas tentunya bukan persoalan baru. Sudah banyak pembahasan dalam bentuk obrolan angkringan sampai kongres pancasila. Aktor yang membahas juga memiliki spektrum yang luas, dari tukang sol sepatu sampai guru besar. Tukang sol sepatu yang rajin beribadah, ketika beliau hendak pulang sempat menyumbang sedikit penghasilannya ke kotak amal mushala. Apa yang beliau lakukan adalah bentuk pembahasan non-verbal dari pancasila. Lalu, para Guru besar dan kumpulan akademisi berbagai perguruan tinggi dalam kongres mencoba mencari abstraksi pancasila, juga bentuk pembahasan pancasila.

Dengan begitu mudahnya menemui manifestasi Pancasila seharusnya bangsa ini sudah makmur semenjak dicanangkan kelima sila tersebut. Naif? Memang. Tapi kenyataan menerjemahkannya dengan bahasa lain. Pancasila seakan semakin melangit, seperti kalimat-kalimat suci yang terlalu tinggi untuk dijangkau. Jika mau dijabarkan, ada saja perbuatan dan atau sikap yang bertentangan dengan Pancasila yang bisa ditemui dalam keseharian di Indonesia. Ditengah bermacam persoalan tersebut, masih ada denyut semangat yang digerakan pemuda Indonesia untuk kembali membumikan pancasila. Adalah Yudi

Latif, seorang akademisi dan aktivis, yang sampai sekarang lincah merambah berbagai media untuk memberi pemahaman yang baik tentang Pancasila.

Yudi Latif dikenal sebagai penulis sekaligus isu sosial-politik di televisi dan radio ini, lahir di Sukabumi, 26 Agustus 1964. Menamatkan S1 nya pada Fakultas Ilmu Komunikasi Padjajaran pada 1990, dilanjutkan dengan S2 dalam Sosiologi Politik dari Australian National University, lulus pada 1999 dan studi doktoralnya dalam Sosiologi Politik dan Komunikasi dari Australian National University pada 2004. Tesis S2-nya tentang Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia: Sebuah Interpretasi Sosiologis. Disertasinya berjudul *The Muslim Intelligentsia of Indonesia: A Genealogy of Its Emergence in the 20th Century*.

Seorang Yudi Latif sejak mahasiswa sudah aktif sebagai penggerak yang aktif berorganisasi. Berawal sebagai koordinator Koordinator Gelanggang Seni Sastra, Teater dan Film (GSSTF), Universitas Padjadjaran. Pada tahun 1989 beliau terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Senat Gabungan Universitas Padjadjaran. Gelegak aktivismenya tidak berhenti di strata satu. Pada masa penunaian beasiswa masternya beliau juga aktif dalam perhimpunan pelajar Indonesia di Canberra, Australia. Karir profesionalitasnya berangkat dari seorang akademisi di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Nusantara. Sedangkan, awalan insting kepenulisan beliau diasah sebagai Editor Buku, di *Center for Information and Development Studies* (CIDES).

Puncaknya, buku beliau yang berjudul 'Negara Paripurna : Historitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila' mengantarkan para pembaca untuk kembali merenungi pemaknaan pancasila. Perenungan ini diiringi narasi apik historis tentang esensi pancasila yang sudah ada sebelum pencasila itu lahir. Deskripsi sejarah ini mengisahkan tentang kekayaan bangsa Indonesia yang hadir sejak jaman leluhur, bahwa kekayaan yang berbentuk kearifan ini diwariskan turun-temurun hingga disarikan oleh para pendiri negara untuk kemudian dinamakan Pancasila. Buku ini secara tidak langsung membuka wawasan tentang sifat ideologi pancasila sebagai ideologi terbuka, bahwa interpretasi yang dilakukan Yudi Latif begitu ekstensif dan mendalam. Gambaran beliau tentang 'rasa Indonesia' yang terkandung dalam Pancasila mengiring pembacanya dalam keagungan 'intisari' bangsa ini.

Kwik Kian Gie, Ekonom, Penggerak Pendidikan dan Mantan Menteri Koordinator Perekonomian, mengungkapkan kekagumannya terhadap karya Yudi Latif ini. "Sangatlah melegakan dan membanggakan bahwa dalam keterpurukan yang sedang dialami oleh bangsa kita, muncul seorang intelektual muda, Yudi Latif, yang mampu menjabarkan dan memperkaya Pancasila sampai pada akar-akar sejarahnya. Buku ini patut disebarluaskan dan dijadikan bacaan wajib bagi setiap warga negara Indonesia."

Penjelasan tentang keadilan juga menarik disimak. Beliau mengutarakan bahwa keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pancasila tidak lain adalah kebenaran itu sendiri. Bahwa kebenaran jika memiliki media untuk ekspresi diri maka akan menemukan keadilan sebagai wujud dasarnya. Sebagai penutup, salah seorang Dosen Filsafat STF Driyarkara, Herry Priyono bersuara 'Di pucuk waktu antara kondisi berantakan dan kelahiran kembali Indonesia, buku ini hadir sebagai olokan dan tantangan.

Kerdilnya komitmen dan wawasan telah membuat kita bagai api yang padam di hadapan nyala keluhuran para pendiri Republik. Dan kehendak kita untuk kembali menyala mesti dimulai dengan pulang ke asal-mula. Pada mulanya adalah Pancasila.'

Sosok Yudi Latif yang bergerak melalui karya tulisnya patut menjadi teladan bagi generasi muda yang tidak jarang terjerembab dalam arus informasi yang begitu cepat. Zaman terus berdinamika seolah tak ada porosnya, tapi Yudi Latif melalui 'Negara Paripurna' menyampaikan bahwa Indonesia masih punya titik acuannya. Titik tersebut singkat hanya lima kalimat, diberi judul Pancasila.

Negeri di Ujung Tanduk

Judul Buku: **Negeri di Ujung Tanduk**
Penulis: **Tere Liye**
Penerbit:
Tahun Terbit:
Tebal Buku:
Peresensi: **Sisca Riani**

Setelah sukses menerbitkan buku berjudul Negeri Para Bedebah, Tere Liye hadir kembali dalam karya terbarunya Negeri di Ujung Tanduk yang merupakan sekuel dari buku Negeri Para Bedebah pada awal April lalu.

Apabila Negeri Para Bedebah lebih banyak menyoroti Thomas dalam kariernya sebagai konsultan finansial profesional, dalam sekuel terbarunya ini Tere Liye menampilkan sosok Thomas sebagai konsultan politik. Dalam Negeri Para Bedebah, Thomas yang berusaha menyelamatkan Bank Semesta yang kolaps yang ternyata adalah milik pamannya dan dikemas dalam alur maju mundur ini, agaknya sedikit mengingatkan tentang kasus Bank Century. Beragam permainan kotor pejabat dan penegak hukum serta pengetahuan tentang teori-teori ekonomi dapat dijumpai dalam buku ini dan disajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian kisah Thomas berlanjut dalam novel berjudul Negeri di Ujung Tanduk, Thomas yang ternyata pernah mengenyam pendidikan ilmu politik kemudian merambah ke lain bidang kerjanya yaitu sebagai konsultan strategi bagi politikus untuk memenangi pemilihan. Klien politik yang berusaha dimenangkan Thomas dalam pemilihan presiden, JD, adalah seseorang yang memiliki integritas tinggi, sederhana, politikus yang bersih dan cita-cita yang mulia untuk Indonesia terutama dalam penegakan hukumnya. Namun, meskipun JD dipastikan meraih suara terbanyak daripada kandidat lain,Default Paragraph Font;, ternyata menjadikan JD sebagai presiden menempuh banyak halangan, konspirasi politik, serta keterlibatan mafia hukum yang ternyata juga merupakan dalang dari konflik dalam buku Negeri Para Bedebah.JD justru ditahan sebagai tersangka korupsi megaproyek tunnel raksasa ketika masih menjabat sebagai gubernur ibu kota. Penangkapan ini disinyalir hanyalah taktik dari lawan untuk menggagalkan terpilihnya JD sebagai presiden. Apakah Thomas akan berhasil meyakinkan kembali dan mengembalikan kepercayaan pada pendukung JD serta bagaimanakah Thomas menyelesaikan kasus ini? Siapa mafia hukum dibalik peristiwa ini yang ternyata juga merupakan bagian dari masa lalu Thomas yang kelam ?

Seperti dalam buku pertamanya, Tere Liye menghadirkan sosok wartawan yang secara insidental menjadi rekan seperjalanan Thomas ketika menjadi buronan para musuhnya. Dalam novel pertama sosok wartawan itu adalah Julia, wartawan dari majalah review ekonomi terkenal sementara dalam novel ini terdapat wartawan review mingguan terkenal se-Asia Pasifik bernama Maryam yang akhirnya juga tersangkut permasalahan Thomas ketika sedang menjalankan tugasnya sebagai wartawan. Kemudian tokoh-tokoh seperti Maggie asisten Thomas yang handal, Opa yang selalu menceritakan pengalaman masa mudanya ketika ia berlayar, Kadek pengemudi kapal milik Thomas, serta Om Liem masih dipertahankan dari Negeri Para Bedebah hingga sekuelnya yaitu Negara di Ujung Tanduk.

“Kita harus menyadari hal ini. Kita sebenarnya sedang berperang melawan kezaliman yang dilakukan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita yang mengambil keuntungan karena memiliki pengetahuan, kekuasaan, atau sumber daya. Kita memilih tidak peduli, lebih sibuk dengan urusan masing-masing, nasib negeri ini persis seperti sekeranjang telur di ujung tanduk, hanya soal waktu akan pecah berantakan. Ini negeri di ujung tanduk, Thomas”

"Kau tahu, Thomas, jarak antara akhir yang baik dan akhir yang buruk dari semua cerita hari ini hanya dipisahkan

oleh sesuatu yang kecil saja, yaitu kepedulian.... Begitu juga hidup ini, Thomas. Kepedulian kita hari ini akan memberikan perbedaan berarti pada masa depan. Kecil saja, sepertinya sepele, tapi bisa besar dampaknya pada masa mendatang."

"Apakah ada di dunia ini seorang politikus dengan hati mulia dan niat lurus? Apakah masih ada seorang Gandhi? Seorang Nelson Mandela? Yang berteriak tentang moralitas di depan banyak orang, lantas semua orang berdiri rapat di belakangnya, rela mati mendukung semua prinsip itu terwujud? Apakah masih ada? Maka jawabannya: selalu ada." "Dengan apa kau melawannya, Tommi?"

"Dengan cara-cara mereka,... Dengan kelicikan, keculasan, pengkhianatan, dan semua cara yang biasa mereka lakukan. Aku mempelajari cara mereka bertahun-tahun."

Demikian kutipan isi buku Negeri di Ujung Tanduk ini. Tere Liye secara berani mengambil tema yang serius yaitu mengenai penegakan hukum, politik serta ekonomi namun dengan bahasa yang menarik dan mudah dimengerti, alur yang menantang serta menyuguhkan konflik yang penuh aksi membuat para pembaca tidak akan bosan membacanya sampai habis.

Namun, terdapat beberapa kritik mengenai buku ini yaitu alurnya dipaksakan terburu-buru seperti perjalanan pesawat Thomas dari Jakarta menuju London yang digambarkan hanya selama 8 jam padahal dalam keadaan sebenarnya rata-rata 14 jam penerbangan, bagaimana bantuan-bantuan yang diberikan kepada Thomas terlalu besar dan banyaknya kebetulan untuk meloloskan Thomas menuju misinya serta kesempurnaan karakter dan prestasi dari tokoh utama sendiri yaitu Thomas sehingga tampak berlebihan.

Meskipun demikian buku ini tetaplah tepat untuk dijadikan konsumsi dan koleksi bacaan karena seperti novel-novel Tere Liye yang lain, buku ini menyajikan banyak pesan moral dan pengetahuan terutama mengenai dunia politik dan ekonomi serta jalan cerita yang cukup membuat penasaran para pembaca.(***)

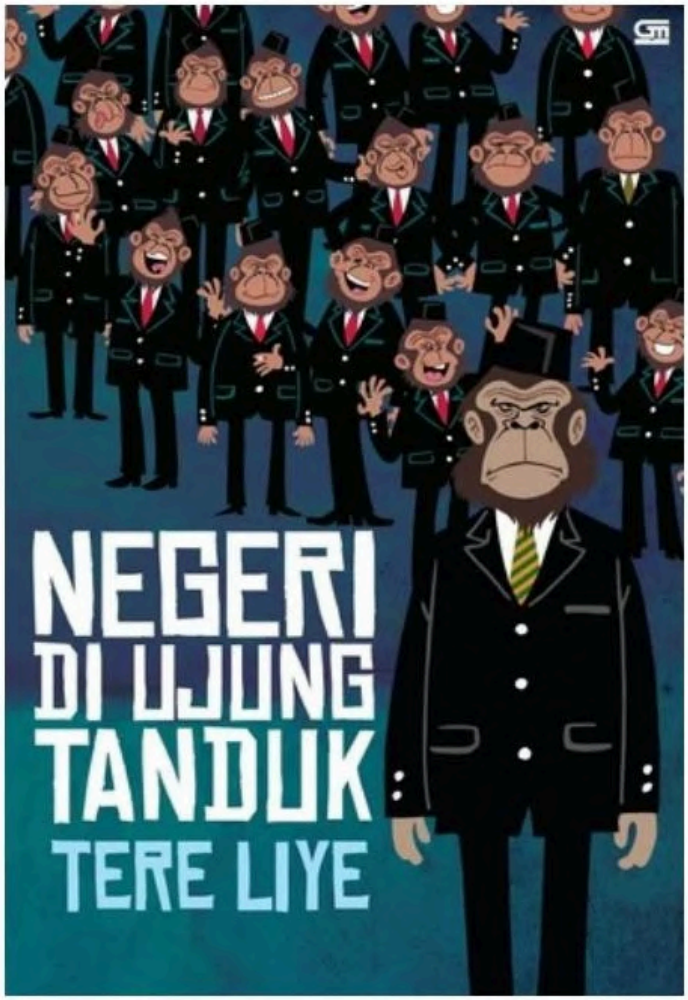

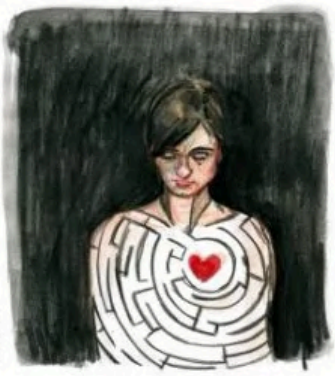

Kehilangan

Oleh : Sekar Banjaran Aji

Secangkir kopi dalam genggamanku sensasi pahit dimulut. Sementara telingaku pedih mendengar lagu-lagu dari album My Chemical Romance yang mungkin terakhir karena sekarang mereka sudah bubar. Meskipun bubarnya mereka tak semenyedihkan perginya Esdaniar tapi tetap saja rasa kehilangan itu enggan hilang dari ingatan. Bahkan dengan gampangnya rasa kehilangan itu hinggap pada hati yang rapuh karena ditinggalkan. Ya, seharusnya rasa kehilangan itu seperti pembalut wanita yang mudah dibuang dan dilenyapkan dari pandangan meski sudah pernah dipeluk erat selangkangan.

Aku menikmati kaffeinku tiap reguknya, kuselingi dengan nikotin. Hidup memang tidak mudah hingga aku harus menyerahkan nyawaku pada zat adiktif yang aku beli dengan uang hasil jerih payah orang tuaku. Untung saja orang tuaku pejabat yang kerjaannya hanya tanda tangan, rapat, dan jalan-jalan jadi perasaan bersalahku tak begitu besar. Bayangkan jika orang tuaku buruh cuci atau pegawai loundry murahan, aku yakin hidupku tak tenang meski minum kopi gopekan dan menghisap kretek setengah. Ah, omonganku sudah tak tertata begini mana mungkin ada yang mau menikmati pemikiran random macam ini. Sebaiknya aku sudahi prolog tak beretika ini walau mungkin saja Kahlil Gibran juga pernah menulis sampah macam ini.

"Fajar? Fajar Wirawan?" kata wanita yang baru saja menepuk pundakku. Matanya membelalak seakan terkejut melihatku. Sedangkan polesan bedaknya yang kurang rata membuatku ingin tertawa.

"Kamu nggak ingat aku? Aku Karin, itu lho Karina Amanda IPA 6! Aku teman sekelasnya Esdaniarmu almarhum."

"Oh ya? Maaf aku nggak ingat soalnya memang nggak hafal sama temenya dia. Kamu kuliah Jogja juga ternyata," jawabku sambil menghela nafas. Esdaniarmu, si wanita yang mengaku Karin ini bilang Esdaniarku. Padahal aku belum sempat bilang kalau Erdaniar milikku.

"Kamu suka nongkrong di sini juga ternyata, kalau tahu begini nggak bakal deh nongkrong sendiri. Eh tapi kamu sendirian kan? Nggak lagi nunggu Esdaniar lain?"

"Nggak kok tenang aja."

Aku menjawab singkat karena pertanyaannya cukup mengguncang. Aku tidak tahu seberapa banyak orang yang tahu tentang kisahku dan Esdaniar

on jika nama Esdaniar jadi sinonim kata cewek? Sesungguhnya wacana-Mu sungguh nyata.

"Ternyata kamu masih terjebak dalam nostalgia, jar. Maafkan aku jika kataku menyulut rasa kehilanganmu itu. Jujur saja menemukanmu di sini tidak ada kata lain yang terlintas dipikiranku selain Esdaniar. Gadis bermata bulat yang begitu periang itu benar-benar sangat cocok untukmu. Kenapa diam Fajar? Kamu mau misuh-misuh sama aku? Ya, *just do it!* Sebenarnya aku juga ingin misuh-misuh pada diriku sendiri. Aku tidak lebih terhormat dari kamu. Kalau kamu tidak bisa move on dari orang yang sudah mati, maka aku tidak bisa move on dari orang yang sudah berganti orientasinya."

Si Karin menghentikan ceritanya, dia mereguk kopinya. Dia menatapku lalu menunduk lagi. Sekarang aku tahu kalau matanya sudah berkantung. Entah dia gila kaffein atau gila yang sebenarnya.

"Kamu pendengar yang baik Fajar, sudah aku potong ceritaku tapi tak ada hasratmu untuk bertanya. Oke baiklah, kantung mataku ini sudah ada sejak berbulan yang lalu saat seseorang yang aku sukai maksudnya aku cintai berkata kalau dia berganti orientasi. Dia bukannya tidak tertarik padaku tapi tidak tidak tertarik lagi pada kaumku. Dia homoseksual. Ini lucu Fajar karena aku belum sempat mengutarakan perasaanku tapi aku ditolak lebih tepatnya kaumku ditolak olehnya. Coba apa salah kaumku hingga tidak diminati lagi? Bukankah dia lahir dari kaumku? Dia lahir dari seorang wanita. Ini sulit diimajinasikan memang tapi cobalah membayangkan, jar."

Aku terkejut mendengarkan cerita Karin. Ada sebuah perasaan sedih pula yang menggelayut di hatiku. Wajar bila darah ibu yang mengalir ditubuhku ikut pilu merasakan kisah Karin. Tissu alas sendok kopiku sudah beraih fungsi sebagai penyeka air mata Karin. Biarlah, biar beban hatinya berkurang pikirku.

"Fajar, kadang aku iri padamu. Aku iri pada setiap kisah cinta yang indah sepertimu. Kamu kehilangan orang dalam keadaan dia mencintaimu. Ibarat mimpi, maka kisahmu adalah mimpi yang indah dan sebaliknya kisahku merupakan mimpi buruk. Aku harus hidup dengan kenyataan bahwa aku mencintai orang yang tidak mungkin menyukaiku."

Aku tertunduk dan sesaat aku tersadar. Kehilangan orang yang kita cintai lebih mudah daripada hidup dengan orang yang kita cintai tapi tidak pernah bisa mencintai kita. Sejenak aku dalami rasaku dan ketika aku mengangkat kepalaku ternyata Karin sudah berlalu bersama segala ceritanya. (***)

sumber gambar ilustrasi: http://stephanelauzonillustration.com/wp-content/uploads/2012/07/Stephane_Lauzon_LOST_930.jpg

© http://kepakgaruda.wordpress.com

Hanya ada tiga polisi yang tidak bisa disuap, yaitu Hoegeng, patung polisi dan polisi tidur

BPPM MAHKAMAH

www.mahkamahnews.org

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

Jalan Socio Justicia No 1, Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta

BACA TULIS LAWAN